RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV					(Rp)		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP**				79,15%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	100%		2.241.605.125	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	100%		1.610.232.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 dokumen	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	281.732.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Gelar Pengawasan Daerah										√	√			
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	64 Laporan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	733.950.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	51 Laporan	Reviu Laporan Keuangan	169.600.000		√	√	√									
						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%		631.373.125		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	Perhitungan kerugian keuangan daerah	28.873.125						√	√	√	√	√	√	√	√
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	50 laporan	Pemeriksaan investigatif	602.500.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Probity audit			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV					(Rp)		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
									Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)						√	√							
									Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan Komponen Evaluasi**				17,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	100%		2.241.605.125	Sekretaris / Irban			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	100%		1.610.232.000				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	40 laporan	Pemeriksaan ketaatan dan/atau kinerja dengan sasaran prioritas daerah yang berisiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan pangan	412.000.000				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Evaluasi AKIP								√	√	√	√			
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	Reviu LPPD	12.950.000				√	√								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	Penerapan SAKIP	24.615.683.032	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV					(Rp)		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
						Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen		12.599.841			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Penyusunan Rencana Kerja 2026 dan Rencana Kerja Perubahan 2025	12.599.841						√	√			√	√		
									Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat			√	√										
									Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025						√	√	√	√	√	√	√	√	√
Meningkatnya peran APIP dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah	**Kapabilitas APIP**				Lev. 2 (Terstruktur)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	Peningkatan kapabilitas APIP	24.615.683.032	Sekretaris / Irban	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%		2.186.314.300			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85 orang	Pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan melalui diklat serta bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP	1.527.375.000			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	212 orang	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	105.152.000					√	√	√	√	√	√	√	√	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ kegiatan/ subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV					(Rp)		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	318 orang	Pelaksanaan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	439.787.300								√	√	√	√	√	
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100%		497.956.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100%		497.956.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	355.004.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	142.952.000						√	√	√					

Medan, Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur,

Erfin Fachrur Razi, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198610132006021002